



Studi Perbandingan Kompetensi Profesional Guru Indonesia dan Thailand

Shokhibul Mighfar^{1*}, Dulfam Aldisya Ervani², Nazilatul Faizah³, Anavee Khoona⁴,
Ainun Nisa⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: <mailto:mailtosmighfar636@gmail.com>*

Abstract. *The quality of education is very dependent on the professional competence of teachers. This study aims to compare professional competence between teachers in Indonesia and Thailand. This research uses a qualitative approach, emphasizing comparative descriptive research. Data were collected through in-depth interviews with 6 teachers (3 from Indonesia and 3 from Thailand) representing various levels of education. Data analysis was carried out using comparative analysis. The results showed significant differences in professional competence between the two countries. Teachers in Indonesia tend to focus on mastering subject matter and implementing the national curriculum, while teachers in Thailand place more emphasis on developing interpersonal skills, classroom management skills, and the use of technology in learning. Factors that influence these differences include different education systems, educational policies, and the culture and social values of society. This research provides valuable insights for education stakeholders in both countries in designing policies and teacher training programs that meet the demands of the times. In addition, this research also contributes to further understanding of the comparison of education systems and teaching practices between Indonesia and Thailand.*

Keywords: *Professional Competence, Teacher, Education, Indonesia, Thailand*

Abstrak. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi profesional guru. Studi ini bertujuan untuk membandingkan kompetensi profesional antara guru di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan penelitian deskriptif komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 6 guru (3 dari Indonesia dan 3 dari Thailand) yang mewakili berbagai tingkat pendidikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam kompetensi profesional antara kedua negara. Guru di Indonesia cenderung memiliki fokus pada penguasaan materi pelajaran dan penerapan kurikulum nasional, sementara guru di Thailand lebih menekankan pada pengembangan keterampilan interpersonal, keterampilan manajemen kelas, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini antara lain sistem pendidikan yang berbeda, kebijakan pendidikan, serta budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan pendidikan di kedua negara dalam merancang kebijakan dan program pelatihan guru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang perbandingan sistem pendidikan dan praktik pengajaran antara Indonesia dan Thailand.

Kata kunci: Kompetensi Profesional, Guru, Pendidikan, Indonesia, Thailand

1. LATAR BELAKANG

Kompetensi profesional guru memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas pendidikan di suatu negara. Guru yang kompeten tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, tetapi juga mampu menginspirasi, membimbing, dan membentuk generasi mendatang dengan baik. Oleh karena itu, perbandingan kompetensi profesional guru antara berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan secara global. Pendidikan merupakan suatu proses dalam meningkatkan harkat martabat manusia, dan berlaku sepanjang hidupnya, yang dapat

dilakukan di mana saja, baik di sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat (Azisi & Qotrunnada, 2021).

Sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai 2024 sekarang ini, Indonesia sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional, namun dampaknya belum signifikan dalam pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia UUD 1945 yang berisi tentang mengamanatkan bahwa hakikat visi pendidikan nasional adalah “untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya”(Supendi, 2016). Ignatius G. Saksono (2010) merinci beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan formal, dan maraknya komersialisasi pendidikan (Hidayat & Patras, 2013). Pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai kebijakan serta regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Indonesia memiliki tiga sistem pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan di Indonesia dimulai sejak umur enam tahun dan menerapkan lama belajar 12 tahun, yaitu enam tahun SD (Sekolah Dasar), tiga tahun SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan tiga tahun SMA (Sekolah Menengah Atas). Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memerdekakan pendidikan dengan cara bebas berpikir dan bebas berinovasi (Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, 2022).

Sistem pendidikan di Thailand memiliki persamaan dengan yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, tanpa perbedaan yang mendasar. Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999 (Adyatama, 2013). Sejak tahun 2002 Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. Namun demikian hasil evaluasi terhadap kurikulum 2001 menunjukkan sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan kurikulum tersebut, meliputi penerapannya, proses pelaksanaannya, kesulitan guru dalam praktisi mempersiapkan kurikulum sekolahnya. Atas dasar temuan-temuan tersebut, Kantor Pendidikan Dasar (*Office of Basic Education Commission, OBEC*), di bawah *supervise* Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi Kurikulum Pendidikan Dasar 2001 guna mempersiapkan Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008 (Hilmin, Dwi Noviani, & Lisdaleni, 2023).

Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu: pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari: program sertifikat kejuruan, program *short course* sekolah kejuruan dan *interest group program* (Hilmin, Dwi Noviani, Lisdaleni, 2023). Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti di Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas, penjaminan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui ujian nasional. Ujian Nasional (UN) di Thailand dikoordinasikan oleh *Bureau Of Education Testing Office* dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai sistem *Ordinary National Education Test* (O-net) (Hilmin, Dwi Noviani, & Lisdaleni, 2023). Akan tetapi, hasil ujian nasional di Thailand tidak memutuskan seorang siswa lulus atau tidak dari jenjang sekolah tersebut. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa dari seluruh propinsi, yang dijadikan sebagai acuan kebijakan perbaikan kualitas pendidikan (Yunardi, 2014).

Perbedaan yang signifikan pada pendidikan di Thailand terletak pada Pendidikan vokasi. Di Thailand, pendidikan vokasi menerapkan lama belajar selama lima tahun, sehingga lulusannya setara dengan lulusan program diploma dua tahun di Indonesia. Sedangkan, di Indonesia, pendidikan vokasi hanya berlangsung selama tiga tahun. Karena perbedaan ini, Thailand tidak memiliki institusi pendidikan tinggi Politeknik seperti yang ada di Indonesia. Politeknik di Thailand berfungsi sebagai pusat pembelajaran seumur hidup atau sebagai penyedia sertifikasi untuk keterampilan khusus, seperti pengelasan atau menjahit. Thailand juga menerapkan kewajiban belajar selama sembilan tahun, serupa dengan Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan hingga menyelesaikan sekolah menengah atas (Yunardi, 2014). Hal ini menyoroti pentingnya kebijakan yang disusun secara cermat untuk mengatur berbagai aspek dalam pendidikan.

Menurut Monahan dalam Syafaruddin, (2008:75) Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu *Polis* yang berarti kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha untuk mengejar tujuannya (Rozak, 2021). Menurut Risnawan (2017), Kebijakan adalah aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah serta dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintahan dalam memecahkan permasalahan yang ada untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Elwijayal, Fadiyah, & Vivi Mairina, 2022). Kebijakan yang mengatur sistem pendidikan disebut dengan

kebijakan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting kehidupan manusia dari generasi ke generasi sepanjang zaman, atau dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak terlepas dari kehidupan manusia di dalam segala aspeknya seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, agama dan kebudayaan (Supendi, 2016). Menurut Junaid (2016) Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Elwijaya1 et al., 2022). Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional haruslah selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan individu yang kreatif, adaptif, dan mampu berkontribusi secara positif dalam dinamika sosial dan kemajuan bangsa.

Tujuan utama dari Pendidikan tersebut yaitu untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi serta mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai keluhuran hidup. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukannya landasan Aksiologi. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Soeprapto, 2013). Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut maka dibutuhkanlah seorang guru yang memiliki kompetensi profesional. Berkaitan dengan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu pada tahun 2022, menurut hasil penelitian *Program for International Student Assesment (PISA)*, Indonesia berada di peringkat 66 dan Thailand berada di peringkat 63 dari 81 negara. Sementara itu, berdasarkan data penelitian yang dilakukan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia tahun 2021 tentang sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dan Thailand berada pada peringkat ke-3, lalu diikuti Malaysia berada pada peringkat ke-2, dan Singapura berada pada peringkat ke-1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan berkualitas akan dapat menjadi kenyataan, apabila dunia pendidikan ditangani oleh tenaga profesional (Sepriyanti, 2012). Oleh sebab itu dibutuhkannya guru profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kompetensi Profesional guru merupakan kemampuan menguasai ilmu secara mendalam untuk bahan pelaksanaan proses pembelajaran dan juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai guru yang profesional, guru tersebut hendaknya memiliki *skill* dan keahlian khusus, terutama dalam proses pengajaran di kelas

(Hayeetahe, 2008). Dalam konteks ini, perbandingan antara kompetensi profesional guru Indonesia dan Thailand menjadi subjek penelitian yang menarik. Meskipun kedua negara tersebut memiliki latar belakang budaya, sejarah, dan sistem pendidikan yang berbeda, namun kedua negara tersebut menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Studi perbandingan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam kompetensi profesional antara guru di Indonesia dan Thailand.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan penelitian deskriptif komparatif, dimana peneliti akan membandingkan kompetensi profesional guru antara Indonesia dan Thailand. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu Teknik wawancara, dan studi literatur. Adapun jenis data atau informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari teori-teori, jurnal, buku literatur, dan internet. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informan, dan dokumen. Informan kami dapat dari Guru yang berada di Thailand dan Indonesia. Dokumen pendukung penelitian ini kami dapat melalui jurnal, buku literatur, dan internet. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik analisis komparatif, dimana peneliti membandingkan data tentang kompetensi guru dari Indonesia dan Thailand untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam aspek-aspek tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kristiawan & Rahmat (2018) berpendapat bahwa profesionalisme adalah kebutuhan yang tidak dapat di tunda lagi, semakin meningkatnya persaingan pendidikan dalam era globalisasi maka perlu di tingkatkan lagi profesionalisme dari seorang guru. Profesional sering diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang dimiliki oleh seseorang. Untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan secara profesional atau memiliki profesionalisme, tentu diperlukan seperangkat pengetahuan, sikap, serta keterampilan tertentu (Anisa Pitriani, 2022). Profesionalisme merupakan sikap dari seorang yang profesional, artinya setiap pekerjaan haruslah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya, menurut (Hall, 1968) konsep profesionalisme dapat dilihat dengan bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dari sikap serta perilaku mereka (Nurqomah, 2021). Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir c menjelaskan

bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Dudung, 2018).

Profesionalisme guru diperlukan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, karena dari profesionalisme berarti sudah memiliki kemampuan dan kewenangan sebagai guru yang akan menjalankan profesi keguruannya, artinya sudah dapat melaksanakan profesinya sebagai guru yang kompeten dan professional (Nurqomah, 2021). Pendidikan berkualitas akan dapat menjadi kenyataan, apabila dunia pendidikan ditangani oleh tenaga professional (Sepriyanti, 2012). Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti yang telah tercantum pada Pasal 5 ayat 1, yaitu; “Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; d) Mematuhi kode etik profesi; e) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; h) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan i) Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum” (Cahyana, 2010). Prinsip-prinsip profesional yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut menegaskan bahwa pentingnya aspek-aspek seperti bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru atau dosen.

Arifin (2000) juga berpendapat bahwa guru profesional di Indonesia pasti memiliki tiga syarat sebagai berikut: (1) Landasan keilmuan yang kuat sebagai perwujudan dari kalangan teknis dan keilmuan pada abad ke-21. (2) Penguasaan keterampilan profesional bersumber pada pengkajian dan praktik pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya sekedar persepsi. Pendidikan adalah sistem yang berlangsung ditempat dan bersifat ilmiah. Pengkajian pendidikan mesti ditujukan kepada praktek pendidikan bangsa Indonesia. (3) Pengembangan kompetensi profesional secara berkepanjangan. Profesi guru merupakan profesi yang terus meningkat antara LPTK dengan praktik pendidikan (Risdiyana, 2021). Menjadi Guru Profesional berarti kemampuan guru untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai seorang pendidik dan pengajar seperti yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, dan UUGD Nomor 14 Tahun 2005: Disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah (Darmadi, 2015). Sementara itu, dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 mengenai standar kompetensi guru menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru yaitu: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri, dan juga menurut Mulyasa (2008) karakter guru yang dinilai dalam kompetensi profesionalnya adalah “(a) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik; (b) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik; (c) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah; (d) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam kelas.” (Asyarah et al., 2024).

Sementara itu, kompetensi profesional guru di Thailand melibatkan penyelesaian tujuh pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai persiapan sebelum mengajar. Pelatihan-pelatihan tersebut yaitu: (1) Pengembangan Program Pendidikan Lima Tahun Pra-Tugas. Program ini menghendaki calon guru untuk menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari empat tahun kuliah dan satu tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan guru yang ingin menjadi guru harus mengikuti program bersertifikat satu tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru. (2) Pelatihan bagi guru tetap Bahasa Inggris Sejumlah instansi, termasuk Kantor Komisi Pendidikan Vokasi yang melaksanakan aktifitas pelatihan untuk guru Bahasa Inggris di bawah pengawasan instansi tersebut. Sementara pada Kantor Komisi Pendidikan Dasar, guru-guru di bawah direktorat dilatih berdasarkan Rencana Strategis Reformasi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Percepatan Kemampuan Kompetitif Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Menteri Thailand pada tahun 2006 dan Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Menurut Rencana Strategis ini, Lembaga Bahasa Inggris yang didirikan oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar bertanggung-jawab untuk menetapkan kriteria pelatihan guru Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan institusi lain, terutama dengan *English Resource and Instructional Centres (ERIC)* di seluruh wilayah Thailand dan *British Council serta American University Alumni (AUA)*, dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah. Aktifitas pelatihan ini berfokus pada lima kategori standar nasional kemampuan guru Bahasa Inggris yang mencakup berupa kompetensi linguistik, kompetensi

komunikasi, pengetahuan teori pengajaran bahasa asing, kemampuan mengorganisasikan pembelajaran konsisten dengan silabus, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Lembaga Bahasa Inggris bertujuan untuk masuk ke dalam kategori *Advanced Level*. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sama dengan dinas pendidikan di seluruh wilayah Thailand. Rata-rata setiap tahun lembaga ini memberikan pelatihan kepada sekitar 30-40 ribu guru Bahasa Inggris. (3) Pelatihan Guru Tetap Matematika dan Sains Institut Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi, sebuah Lembaga independen di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan guru, serta menjadi supervisor dan tenaga administrasi dalam bidang sains, matematika dan teknologi informasi. (4) Penyelesaian Sarjana Pendidikan Bagi Guru Tetap. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru tetap dan direktur sekolah, dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon guru harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Universitas telah melaksanakan program khusus ini bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana sejak tahun 2003. Berdasarkan laporan dari kementerian Pendidikan pada tahun 2008 seluruh guru di Thailand telah memenuhi kualifikasi minimum sarjana. (5) Program Sertifikat dan Pasca-Sarjana merupakan pendidikan Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau pasca sarjana pendidikan. (6) Program bersertifikat bagi Tenaga Administrasi yaitu Tenaga Administrasi Kependidikan harus memiliki sertifikat, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, seseorang harus memiliki kualifikasi sarjana atau *Post-Graduate Certificate* dalam bidang Administrasi Pendidikan, jika sarjananya bukan berasal dari bidang pendidikan. Universitas Pendidikan Rajabhat memiliki program sertifikasi bagi tenaga-tenaga administrasi sekolah. Program ini dilaksanakan di sekolah, sehingga tenaga-tenaga administrasi dari berbagai sekolah di satu daerah dapat mengikuti program sertifikat ini tanpa harus meninggalkan tempat kerja. (7) Program Master bagi tenaga administrasi yaitu tenaga administrasi pendidikan yang memiliki gelar sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana dalam bidangnya (Yunardi, 2014).

Dengan adanya program-program pelatihan dan pengembangan yang beragam bagi guru dan tenaga administrasi pendidikan di Thailand, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan persiapan kompetensi profesionalisme guru antara Indonesia dan Thailand. Perbedaan dalam kompetensi profesional guru antara Indonesia dan Thailand dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sistem pendidikan, kurikulum, pelatihan guru, dan budaya pendidikan di kedua negara tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada guru di Thailand, hasil tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki kompetensi profesional yang kuat. Mereka menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri, kepuasan dalam pekerjaan, kemampuan untuk menginspirasi siswa, penguasaan teknologi pendidikan, perhatian terhadap kemajuan siswa, dan fokus pada pengembangan karakter siswa. Semua ini merupakan ciri-ciri utama dari seorang guru yang profesional. Sementara itu hasil wawancara guru di Indonesia menunjukkan bahwa mereka lebih menekankan pada pentingnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran sejenis dan penerapan penilaian untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran menunjukkan kesadaran akan pentingnya kerja sama antar rekan sejawat dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif serta menekankan pentingnya penggunaan penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur pemahaman siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka.

Responden dari kedua negara tersebut menunjukkan kompetensi yang penting dalam konteks profesionalisme guru, namun mereka memiliki fokus yang sedikit berbeda. Guru di Indonesia lebih menekankan pada pentingnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran sejenis dan penerapan penilaian untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran menunjukkan kesadaran akan pentingnya kerja sama antar rekan sejawat dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif. Mereka juga menekankan pentingnya penggunaan penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur pemahaman siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan orientasi pada efektivitas pembelajaran dan pengembangan profesional yang berkelanjutan melalui kolaborasi dan refleksi terhadap hasil penilaian.

Di sisi lain, guru di Thailand menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri, kepuasan dalam pekerjaan, kemampuan untuk menginspirasi siswa, penguasaan teknologi pendidikan, perhatian terhadap kemajuan siswa, dan fokus pada pengembangan karakter siswa menekankan aspek-aspek penting lainnya dalam profesionalisme guru. Mereka menunjukkan komitmen terhadap pengembangan diri, kepuasan intrinsik dalam pekerjaan mereka, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi siswa, serta penguasaan teknologi pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Mereka juga menunjukkan perhatian yang kuat terhadap kemajuan dan perkembangan karakter siswa. Namun tergantung pada konteks dan kebutuhan sekolah atau lingkungan belajar tertentu, salah satu mungkin dianggap lebih profesional daripada yang lain. Misalnya, di lingkungan di mana kerja sama tim dan penilaian berbasis data sangat dihargai, guru yang menekankan kolaborasi dan penilaian mungkin dianggap lebih profesional. Di tempat lain yang lebih fokus pada pengembangan

pribadi dan hubungan yang mendalam dengan siswa, guru yang menunjukkan kesadaran akan kepuasan dalam pekerjaan dan pengembangan karakter siswa mungkin lebih dihargai.

Dalam kesimpulannya, wawancara ini menggambarkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya mencakup keterampilan mengajar, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap pengembangan diri, kepuasan dalam pekerjaan, dan perhatian terhadap perkembangan siswa secara holistik. Dengan terus menerapkan praktik terbaik dalam pendidikan, baik guru di Thailand maupun di Indonesia dapat terus menjadi agen perubahan yang positif dalam menghasilkan generasi yang terampil, cerdas, dan berprestasi baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat perbedaan signifikan dalam kompetensi profesional di negara Indonesia dan Thailand. Guru di Indonesia cenderung memiliki fokus pada penguasaan materi pelajaran dan penerapan kurikulum nasional, sementara guru di Thailand lebih menekankan pada pengembangan keterampilan interpersonal, keterampilan manajemen kelas, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini antara lain sistem pendidikan yang berbeda, kebijakan pendidikan, serta budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan pendidikan di kedua negara dalam merancang kebijakan dan program pelatihan guru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang perbandingan sistem pendidikan dan praktik pengajaran antara Indonesia dan Thailand.

DAFTAR REFERENSI

- Adyatama, R. P. (2013). Penerapan kurikulum pembelajaran IPS di Thailand. *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kv5wp>
- Aisyah, N. (2021). 5 negara ASEAN dengan sistem pendidikan terbaik tahun 2021, RI termasuk? <https://setnasasean.id/news/read/5-negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021-ri-termasuk#:~:text=3.%20Thailand,lebih%20tinggi%20dari%20tahun%202020,diakses%20pada%207%20Mei%202024>.
- Asyarah, W. N., Wulandari, F., Primasti, Y. D., Wijaya, H., & Warman. (2024). Pengembangan standar dan kualitas kompetensi guru profesional melalui program sertifikasi di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14590–14599. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14459>
- Azisi, A. M., & Qotrunnada, L. (2021). Analisis kebudayaan dan sistem pendidikan Islam kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand). *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 73–87. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v7i2.222>

- Cahyana, A. (2010). Pengembangan kompetensi profesional guru dalam menghadapi sertifikasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(1), 85–91. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.434>
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v13i2.113>
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2022). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Hayeetahe, N. (2008). Implementasi supervisi kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalitas guru (Issue April). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/4299>
- Hidayat, R., & Patras, Y. E. (2013). Evaluasi sistem pendidikan nasional Indonesia. *Isqae*, 235–244.
- Hilmin, D., Noviani, L., & Lisdaleni, M. N. (2023). Pendidikan Islam di Thailand dan Indonesia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 51–70. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.119>
- Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan profesionalisme guru melalui inovasi pembelajaran. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 373-390. <https://doi.org/10.25217/ji.v3i2.348>
- Nurqomah, R. (2021). Kompetensi profesionalisme guru. *Aksioma Ad-Diniyah*, 9(1), 27–30. <https://osf.io/preprints/87rqm/>
- Pitriani, A. (2022). Konsep profesionalisme keguruan. Program Studi Pendidikan Sejarah. <https://doi.org/10.31237/osf.io/8svf5>
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan profesionalisme guru dalam. *Seminar Nasional Ilmu*, 3(2), 197. <https://prosiding.esaunggul.ac.id/index.php/snip/article>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. doi:10.51275/alim.v3i2.218
- Sepriyanti, N. (2012). Guru profesional adalah kunci mewujudkan pendidikan berkualitas. *Al-Ta Lim Journal*, 19(1), 66–73. <http://dx.doi.org/10.15548/jt.v19i1.8>
- Soeprapto, S. (2013). Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 32(2), 266–276. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v0i2.1485>
- Supendi, P. (2016). Variasi (format) sistem pendidikan di Indonesia. *Almufida*, 1(1), 159–181. <https://doi.org/10.46576/almufida.v1i1.110>

- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka: Sebuah kajian literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Wuryanto, H., & Abduh, M. (2022). Mengkaji kembali hasil PISA sebagai pendekatan inovasi pembelajaran untuk peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/mengkaji-kembali-hasil-pisa-sebagai-pendekatan-inovasi-pembelajaran--untuk-peningkatan-kompetensi-li>, diakses pada 7 Mei 2024.
- Yunardi, Y. (2014). Sistem pendidikan di Thailand. Kantor Atase Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok. atdikbudbangkok.org.